

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Akib, Muhammad, 2012, *Politik Hukum Lingkungan (Dinamika dan Refleksinya dalam Produk Hukum Otonomi Daerah)*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Arikunto, Suharsini, 2013, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Erwin, Muhammad, 2007, *Hukum Lingkungan: dalam sistem kebijaksanaan pembangunan Lingkungan Hidup Edisi Ketiga*, Refika Aditama, Bandung
- Fatoni, Abdurrahman, 2011, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Gulo, 2002, *Metodologi Penelitian*, Grasindo, Jakarta.
- Hardjasoemantri, Koesnadi, 2017, *Hukum Tata Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Robert Kay and Jacqueline Alder, 1999, *Coastal Planning and Management, London & New York, Taylor & Francis Group, page 79.*
- Rangkuti, Siti Sundari, 2005, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Edisi ke 3, Airlangga University Press, Surabaya.
- Ridwan, Juniarso dan Achmad Sodik, 2008, *Hukum Tata Ruang dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah*, Nuansa, Bandung.
- Salim, Emil, 1993, *Pembangunan Berwawasan Lingkungan*, LP3ES, Jakarta.
- Soemarwono, RM. Gatot P., 1996, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Stec, Stephen and Susan Case-Lefkowitz, 2000, *The Aarhus Convention: An Implementation Guide*, United Nations, New York and Geneva.
- Sugiyono, 2014, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung.
- Wahid, Yunus, 2014, *Pengantar Hukum Tata Ruang*, Kencana, Jakarta.

C. Jurnal

- Ariadno, Melda Kamil. A., "Prinsip-Prinsip Dalam Hukum Lingkungan Internasional", *Hukum Lingkungan Internasional*, Nomor 2, Maret-April 1999, hlm 114-116.
- Arnstein, 1969, "A Ladder of Citizen Participation" *Journal of the American Planning Association* 35: 4, 216-224
- Dara, Prem Kumar, T. Byragi Reddy, Ketema Tilahun Gelaye, "Public Participation In Environmental Impact Assessment- Legal Framework", *International Journal Of Research*, Vol. 5 (Iss.5), May 2017, hlm 271.
- Helmi, "Hukum Lingkungan dalam Negara Hukum Kesejahteraan untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan", *INOVATIF*, Vol. 4 No. 5, Juli 2011, hlm 99-101.
- Keraf, Sonny, *Pembangunan Berkelanjutan atau Berkelanjutan Ekologi?, dalam Erman Rajagukguk dan Ridwan Khairandy* (Editor), 2001, *Hukum dan Lingkungan Hidup Indonesia*, Program Pascasarjana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hlm, 1.
- Mukhlis, "Konsep Hukum Administrasi Lingkungan dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan", *Jurnal Konstitusi*, Volume 7, Nomor 2, April 2010, hlm 75.
- Warren, Carol, & Agung Wardana, "Sustaining the Unsustainable? Environmental Impact Assessment and Overdevelopment in Indonesia" *Asia Pacific Journal of Environmental Law*, Vol. 21, Issue 2, 2018, hlm. 101-125.
- Yakin, Sumadi Kamarol, "Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Sebagai Instrumen Pencegahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan", *Badamai Law Journal*, Vol. 2, Issues 1, Maret 2017, hlm 116.

D. Tugas Akhir

- Andre Abrianto, 2017, "Analisis Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 99 Pk/Tun/2016 Dalam Kasus Izin Lingkungan Pt Semen Indonesia (Persero) Tbk di Kabupaten Rembang", *Skripsi*, Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Ferry Ramadhan, 2018, "Penerapan Dokumen dan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (Kajian Hukum Ketataan Lingkungan Universitas Gadjah Mada)", *Skripsi*, Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Qorih Imami, 2020, "Evaluasi Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) Rumah Sakit Daerah Kalabahi di Kabupaten Alor", *Tesis*, Magister Ilmu Lingkungan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

E. Internet

Affan, Faizal, 2019, "Warga Keposong Boyolali Demo di Depan Kantor Gubernur Jateng, Tuntut Penghentian Tambang Galian C", <https://jateng.tribunnews.com/2019/08/28/warga-keposong-boyolali-demo-di-depan-kantor-gubernur-jateng-tuntut-penghentian-tambang-galian-c>.

DPMPSTSP Provinsi Jawa Tengah, 2018, "Rekap Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Yang Telah Diterbitkan Di Provinsi Jawa Tengah- Update per-Oktober2018", <https://ppid.esdm.jatengprov.go.id/perizinan/dokumen/pertambangan/Rekap-Data-IUP-Dinas-ESDM-Prov-Jateng-Oktober-2018.pdf>

Federation of American Scientists, "The National Environmental Policy Act : Background and Implementation", CRS Report for Congress, Update February 29, 2008, <https://fas.org/sgp/crs/misc/RL33152.pdf>

Geografis Kabupaten Boyolali, Website Resmi Kabupaten Boyolali, <http://boyolali.go.id/22-modules/20-post>.

Lewis, Jack. "The Birth Of EPA", EPA Journal, November 1985, <https://archive.epa.gov/epa/aboutepa/birth-epa.html>.

Putranto, Puthut Dwi, 2020, "187 Tambang Galian C Ilegal di Jawa Tengah, Kepala ESDM Jateng: Pengawasan Susah", <https://jateng.tribunnews.com/2020/03/09/187-tambang-galian-c-ilegal-di-jawa-tengah-kepala-esdm-jateng-pengawasan-susah>

Saputra, Imam Yuda, 2019, "Sepanjang 2019, Jateng Setop 63 Tambang Ilegal", <https://www.solopos.com/sepanjang-2019-jateng-setop-63-tambang-ilegal-1004970#>

Sustainable Development, "Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future", <https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/5987our-common-future.pdf>

United Nation, "General Assembly", A/CONF.15/26 (Vol.I)Report of the United Nations Conference on Environment and Development, 12 August 1992, page 2,

https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/general-assembly/docs/globalcompact/A_CONF.151_26_Vol.I_Declaration.pdf

Wahyu, Fekek, 2019, "Warga Boyolali Protes Galian C ke Ganjar",
<https://www.liputan6.com/regional/read/4049501/warga-boyolali-protos-galian-c-ke-ganjar>.

F. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 573)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525)

Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111)

Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285)

Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia 2012 Nomor 990)

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis

Dampak Lingkungan Hidup Dan Izin Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 991)

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI Nomor 08 Tahun 2013 Tentang Tata Laksana Penilaian Dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1256)

Peraturan Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 36)

Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 9 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Boyolali Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 130).